

## Modul Perkuliahan

# SOSIOLOGI MASYARAKAT MARITIM

Drs. Akhmad Ganefo, M.Si

Program Studi Sosiologi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember  
2023

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas izin dan *ridho*-Nya, akhirnya naskah silabus dan pokok-pokok materi mata kuliah “Sosiologi Masyarakat Maritim” ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan naskah ini untuk memudahkan penyampaian materi mata kuliah Sosiologi Masyarakat Maritim di Program Studi Sosiologi, FISIP Universitas Jember, mengingat literatur yang tersedia untuk mata kuliah ini tidak mudah didapatkan oleh mahasiswa. Penyajian mata kuliah Sosiologi Masyarakat Maritim sangat penting bagi penambahan wawasan pengetahuan mahasiswa tentang masalah kemaritiman, mengingat Indonesia adalah negara maritim yang terbesar di dunia. Sekalipun demikian, perhatian akademik terhadap persoalan sosial budaya maritim ini masih sangat langka dan tidak intensif.

Karena itu, pemberian perkuliahan Sosiologi Masyarakat Maritim merupakan langkah strategis dan visioner Program Studi Sosiologi FISIP Universitas Jember dalam berdialog dengan kebutuhan pembangunan bangsa yang bertumpu pada kekuatan kemaritiman nasional di masa-masa mendatang. Naskah ini akan dikembangkan lebih lanjut sebagai “buku ajar” yang komprehensif dan berupaya diterbitkan secara luas, sehingga dapat digunakan oleh berbagai program studi/jurusan/fakultas yang menyajikan mata kuliah sama atau mata kuliah yang berkaitan dengan isu-isu sosial budaya masyarakat maritim.

Mei 2023

DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Pokok Bahasan 1	
SOSIOLOGI MASYARAKAT MARITIM .....	1
Pokok Bahasan 2	
MASYARAKAT DAN KEBUDAYAAN PESISIR .....	3
Pokok Bahasan 3	
PERSPEKTIF GEOGRAFIS DAN HISTORIS .....	7
Pokok Bahasan 4	
POTENSI PEMBANGUNAN EKONOMI KELAUTAN (DI KAWASAN PESISIR DAN LAUTAN) BERDASARKAN JENIS SUMBERDAYA ALAM .....	14
Pokok Bahasan 5	
STRUKTUR SOSIAL MASYARAKAT PESISIR .....	18
Pokok Bahasan 6	
ORGANISASI KERJA NELAYAN .....	22
Pokok Bahasan 7	
ARTI STRATEGIS NEGARA BAHARI .....	28
Pokok Bahasan 8	
PERSPEKTIF NEGARA PULAU & MARITIM .....	33
Pokok Bahasan 9	
MODERNISASI & FORMASI SOSIAL NELAYAN .....	36
Pokok Bahasan 10	
ADAPTASI NELAYAN .....	38
Pokok Bahasan 11	
KONFLIK NELAYAN .....	41
Pokok Bahasan 12	
KESETARAAN KUALITAS SDM BAHARI DENGAN BANGSA LAIN .....	43

Pokok Bahasan 13

PERIKANAN INDONESIA-AUSTRALIA (KASUS PENCURIAN IKAN) ..... 50

DAFTAR PUSTAKA .....



### **SOSIOLOGI MASYARAKAT MARITIM**

#### Sosiologi kelautan

- **Clark Cameron** (1961) ilmuwan awal yang menggunakan nama sosiologi kelautan (marine sociology) dalam menjelaskan perihal sosiologi pertanian laut (sociology of marine agriculture).
- Penggunaan frasa sosiologi kelautan kemudian dilanjutkan oleh salah satunya, **Song Ning'er**, seorang sarjana dari China Ocean University

#### Sosiologi maritime

- terminologi sosiologi maritim (maritime sociology) ditemukan dalam artikel sarjana sarjana Eropa, seperti Ludwik Janiszewski dan Bartlomiejski.
- Menurut Ludwik Janiszewski (1985) dalam Bartlomiejski (2011), subjek dari sosiologi maritim meliputi empat bidang kajian, yaitu
  - sosiologi pelaut (seafarers sociology),
  - sosiologi organisasi maritim (sociology of maritime institution),
  - sosiologi mengenai proses sosial karakter maritim (sociology of social process of maritime characters)
  - dan sosiologi komunitas ekologis maritim (sociology of maritime ecological communities).

#### Masyarakat maritime

- Masih menurut Janiszewski (1985) dalam Bartlomiejski (2011), ia mengajukan sebuah penjelasan mengenai masyarakat maritim :
  - Mereka mendiami satu wilayah geografis yang berdampingan dengan laut ataupun perkampungan nelayan.

- Mereka juga mempunyai berbagai **ikatan sosial** yang saling menguntungkan **terkait emosi dan kewajiban**, baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan sosial, dan memenuhi keperluan hidupnya dari apa yang ada di wilayahnya serta berbagi **identitas bersama**.
- Clausen dan Clark (2005) dalam salah satu artikel ilmiahnya menyatakan: terdapat tiga area substantif yang bisa digunakan untuk melihat hubungan antara manusia dengan laut, yakni:
  - akses dan alokasi sumber daya,
  - pengetahuan ekologi tradisional
  - dan konstruksi sosial mengenai alam.

Masy pesisir, kelautan/bahari, maritime

- **masyarakat pesisir** atau masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada laut
- **Kelautan (marine) / bahari** mereka memiliki **orientasi ke laut** yang cukup kuat, meski dalam kenyataannya mereka tidak memiliki wilayah laut yang besar atau dominan, dan ketergantungan sebagian besar masyarakatnya terhadap laut tidak terlalu tinggi.
- **Masyarakat maritim**, lebih menekankan pada *aspek relasional antara masyarakat dan lingkungan fisik atau alamnya yang berwujud lautan*.
  - Bisa jadi, sebuah masyarakat maritim pada hari ini tidak memiliki tradisi kebaharian yang kuat. Sebaliknya, sebuah masyarakat daratan (continental) justru memiliki budaya bahari yang dominan.
  - **Tolok ukur kebaharian** : kemampuan sebuah masyarakat ataupun bangsa untuk **melakukan penjelajahan internasional**, baik dalam kerangka ekonomi, politik ataupun penyebaran keagamaan.

### MASYARAKAT DAN KEBUDAYAAN PESISIR

#### A. PERSPEKTIF GEOGRAFIS DAN HISTORIS

##### 1a. Perspektif Geografis

Suatu realitas fisik-geografis bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan atau negara maritim terbesar di dunia, terdiri atas ribuan pulau-pulau besar dan kecil. Contoh negara-negara maritim selain Indonesia adalah Jepang dan Filipina. Selain itu, terdapat negara kepulauan yang terdiri atas satu atau beberapa pulau. Biasanya, tipe negara kepulauan yang demikian memiliki wilayah laut dan darat (*pulau-pulau*) yang terbatas. Contoh negara-negara kepulauan jenis terakhir ini adalah Singapura, Madagaskar, Taiwan, dan Fiji (*Kovenski PBB tentang Hukum Laut 1982*).

Konstruksi geografis negara maritim, berbeda dengan negara pantai, yakni negara yang memiliki garis pantai karena sebagian wilayahnya berbatasan langsung dengan laut. Negara pantai kadang kala juga memiliki beberapa atau puluhan pulau, seperti Malaysia, Thailand, dan Myanmar.

Negara Kepulauan/Maritim Indonesia sering juga disebut sebagai Benua Maritim Indonesia (BMI). Perbandingan rentang wilayah BMI ini, dari Sabang-Merauke, setara dengan dari Inggris-Laut Kaspia.

Posisi geografis BMI terletak dalam posisi silang antara dua benua: Asia-Australia dan Samudra Hindia-Pasifik, dan menjadi jalur pelayaran laut atau lalu-lintas laut (Asia Timur-Asia Barat) terpadat di dunia.

Tantangan ke depan sebagai kompetitor Selat Malaka adalah rencana Thailand membuka Terusan Kra-Mae Nam Khong, yang menghubungkan Laut Andaman dengan Teluk Siam-Laut Cina Selatan, sebagai jalur pelayaran terpendek. Gagasan Terusan Kra ini sudah muncul pada tahun 1677, saat Thailand dibawah pemerintahan Raja Narai Agung. Jalur pelayaran lain yang pernah berlangsung pada masa silam adalah dari Asia Barat ke Asia Timur adalah melalui Selat Sunda dan Selat Lombok.

Oleh sebab itu, kemampuan Indonesia mengelola potensi sumber daya laut, termasuk mengoptimalkan jalur-jalur transportasi laut yang memberikan kontribusi pembangunan wilayah/nasional sangat diperlukan agar kita tidak tertinggal dari negara-negara lain. Pengembangan Pulau Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas (*Free Trade Zone*) merupakan salah satu langkah strategis untuk mengelola potensi pembangunan di sektor kelautan. Pulau-pulau lain masih terbuka untuk dikembangkan, seperti pengembangan segitiga pariwisata bahari antara Banyuwangi-Madura Timur-Bali Utara.

## 1b. Perspektif Historis

Sejak masa kerajaan-kerajaan tradisional, masa kolonial, hingga sekarang, jalur niaga laut, perdagangan antarpulau, antarbenua, antarbagian benua Asia, dan pelabuhan-pelabuhan di berbagai wilayah Indonesia, seperti Bagan Siapi-api, Palembang, Banten, Cirebon, Cilacap, Semarang, Tuban, Gresik, dan Surabaya mengambil peranan yang strategis dalam perkembangan kegiatan ekonomi maritim. Sejalan dengan perubahan kebijakan pemerintah setelah kemerdekaan, khususnya pada tahun 50-an ketika pemerintah menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, dinamika perekonomian maritim nasional mulai menyusut. Banyak pelabuhan-pelabuhan yang sebelumnya menjadi penggerak perekonomian wilayah semakin berkurang peranannya. Daerah-daerah tempat pelabuhan-pelabuhan itu berada menjadi desa-desa pertanian. Perubahan demikian telah menurunkan peranan: industri perkapalan, perdagangan antarpulau, hilangnya *etos saudagar*, dan renggangnya hubungan antarkelompok etnik dalam masyarakat Indonesia. Sebagai contoh: pada tahun 60-an akhir di Pelabuhan Banyuwangi (*Boom*) sangat ramai bersandar perahu dari berbagai daerah Indonesia dalam pertukaran perdagangan antarwilayah, sekarang sudah tidak ada lagi, tinggal sedikit. Yang paling penting dalam konteks ekonomi adalah hilangnya *etos saudagar*, yang dihancurkan oleh Belanda secara bertahap melalui peran VOC memonopoli kegiatan perdagangan rempah-rempah di seluruh wilayah Indonesia.

## B. PENGERTIAN MASYARAKAT DAN KEBUDAYAAN PESISIR

### B.1 Definisi

1. Masyarakat adalah kesatuan sosial kolektif manusia yang pola-pola interaksi sosialnya diikat oleh sistem nilai budaya yang berlaku, memiliki identitas bersama dan batas-batas

kesatuan sosial, struktur sosial yang ada bersifat mantap, dan terbentuk karena sejarah sosial yang sama.

2. Kebudayaan adalah sistem gagasan atau sistem kognitif masyarakat yang menjadi referensi dari pola-pola kelakuan sosial individu-individu dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Pesisir adalah satuan geografis yang membentang dalam wilayah transisi antara laut dan darat.
4. Berdasarkan uraian di atas dapat didefinisikan pengertian masyarakat pesisir dan kebudayaan pesisir.

## B.2 Ciri-ciri Sosial-Budaya

Ciri-ciri perilaku sosial-budaya ini dipengaruhi oleh kondisi geografis pesisir dan karakteristik matapencaharian penduduk pesisir sebagai pengelola sumber daya kelautan-perikanan laut, khususnya sebagai nelayan. Ciri-ciri tersebut di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Etos kerja tinggi.
2. Kompetitif dan individualistik.
3. Berorientasi prestasi dan menghargai keahlian.
4. Terbuka dan ekspresif.
5. Solidaritas sosial yang tinggi.
6. Konsumtif
7. Demonstratif dalam harta-benda (emas, perabotan rumah, bangunan rumah, dan sebagainya).
8. Relasi *patron-klien* yang kuat.

## C. NELAYAN SEBAGAI ENTITAS SOSIAL

### C.1 Struktur Masyarakat Pesisir

Masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang kompleks dari aspek matapencaharian yang ada. Masyarakat ini terdiri atas kelompok-kelompok sosial sebagai berikut.

1. Nelayan tangkap (*fishing*) sebagai entitas kelompok sosial yang utama.
2. Pedagang ikan.
3. Pengusaha pengolahan hasil tangkap, seperti pemindang, pengering ikan, pengasap, pengusaha trasi, pengusaha krupuk ikan, dan sebagainya.
4. Pembudidaya ikan di wilayah perairan (karamba-japung untuk udang laut dan ikan kerapu)
5. Petambak (udang dan bandeng)
6. Pengusaha jasa perikanan (tukang perahu, montir/bengkel mesin perahu, pemilik toko alat-alat tangkap, dan sebagainya).
7. Pemilik toko/warung barang-barang konsumsi.
8. PNS/ABRI/Swasta
9. Kegiatan jasa dan perdagangan lainnya.

## C.1 Posisi Sosial-ekonomi dan Politik Nelayan

1. Produsen perikanan tangkap.
2. Penentu dinamika ekonomi perikanan.
  - Menghidupi masyarakat lokal dengan menciptakan peluang kerja yang tersedia.
  - Membantu aktivitas ekonomi masyarakat dan desa di sekitarnya.
  - Membuat kaya pedagang ikan.
3. Terabaikan oleh negara, sehingga menimbulkan sikap resistensi politik.

**POTENSI PEMBANGUNAN EKONOMI KELAUTAN  
(DI KAWASAN PESISIR DAN LAUTAN)  
BERDASARKAN JENIS SUMBERDAYA ALAM**

**A. SUMBER DAYA DAPAT PULIH (*RENEWABLE RESOURCES*)**

- Ikan dan Biota lainnya
- Hutan Mangrove/Bakau
- Terumbu Karang
- Pulau-pulau Kecil
- Dan lain-lain

**B. SUMBER DAYA TIDAK DAPAT PULIH (*NON-RENEWABLE RESOURCES*)**

- Minyak dan Gas Bumi
- Bahan Tambang dan Mineral lainnya

**C. ENERGI KELAUTAN**

- Gelombang
- OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion)
- Pasang surut
- Angin

**D. JASA-JASA LINGKUNGAN (*ENVIRONMENTAL SERVICES*)**

- Sarana Transportasi dan Media Komunikasi
- Keindahan Alam
- Pengaturan Iklim
- Penyerapan Limbah

**E. POTENSI PEMBANGUNAN EKONOMI KELAUTAN**

## BERDASARKAN SEKTOR KEGIATAN

1. Perikanan Tangkap (DKP)
2. Perikanan Budidaya (DKP)
3. Industri Pengolahan Produk Perikanan (DKP)
4. Industri Bioteknologi (DKP)
5. Pariwisata Bahari/Pantai
6. Pertambangan dan Energi
7. Perhubungan Laut
8. Industri Maritim: Kapal, Bangunan Laut-Pantai, dll.
9. Hutan Mangrove, Terumbu Karang, dll. (DKP)
10. Pulau-pulau Kecil (DKP)
11. *Non-conventional Resources: Deep sea water industries, hydrothermal vents, dll. (DKP).*

Tabel 1  
SASARAN PEMBANGUNAN PERIKANAN  
TAHUN 2005-2009

No.	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
1.	Produksi Perikanan (Ton)	7.329.980	8.461.050	9.465.100	9.968.650	10.472.380
	a. Perikanan Tangkap	5.129.980	5.461.050	5.465.100	5.468.650	5.472.380
	b. Perikanan Budidaya	2.200.000	3.000.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000
2.	Ekspor Hasil Perikanan (US \$ 000)	3.800.000	5.000.000	5.750.000	6.250.000	6.750.000
3.	Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	26,55	27,45	28,60	30,10	31,70
4.	Penyediaan	6,90	7,40	8,10	9,00	10,10

	Kesempatan Kerja Kumulatif (Juta orang)					
5.	Kontribusi terhadap PDB Nasional (%)	2,50	3,90	5,60	7,60	9,90
6.	Jangkauan Program Pengentasan Kemiskinan (% populasi masyarakat pesisir)	7,50	13,0	22,00	31,00	40,00

Sumber: DKP RI, 2005

Tabel 2

PERKIRAAN UMUM NILAI EKONOMI  
POTENSI SUMBER DAYA PERIKANAN

Komoditi	Potensi Lestari (1000 Ton)	Perkiraan Nilai (US\$ Juta)
Perikanan Tangkap di Laut	5.006	15.101
<i>Tangkap di Perairan Umum</i>	<i>356</i>	<i>1.068</i>
Budidaya Perairan Laut ( <i>Marineculture</i> )	46.700	46.700
Perikanan Budidaya Tambak	1.000	10.000
<i>Perikanan Budidaya Air Tawar</i>	<i>1.039</i>	<i>5.195</i>
Potensi Bioteknologi Kelautan	-	4.000
<b>TOTAL</b>		<b>82.064</b>

Sumber: DKP RI, 2005

Catatan: *Potensi nilai ekonomi sektor kelautan dan perikanan nasional per tahun sekitar US\$ 82 Milliar.*

Tabel 3  
KONTRIBUSI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI

Uraian	Sebelum 1999	Sesudah 2003
Produksi Perikanan	4 Juta ton	6 Juta Ton
Devisa Negara	US\$ 1,4 Milyar	US\$ 2,0 Milyar
PNBP	Rp 1 Milyar	Rp 350 Milyar
PDB Nasional	Rp 25 Trilyun	Rp 44,7 Trilyun
Kerugian <i>Illegal Fishing</i>	US\$ 4 Milyar	US\$ 1 Milyar

Sumber: DKP RI, 2005

Tabel 4  
POTENSI WILAYAH PERIKANAN TANGKAP

Wilayah Perairan	Potensi (1.000 Ton)	Produksi (1.000 Ton)	Status Pemanfaatan
1. Selat Malaka	276,03	389,28	Overfishing (+ 100%)
2. Laut Cina Selatan	1.057,05	379,90	Underfishing (35,94%)
3. Laut Jawa	796,64	1.094,41	Overfishing (+ 100%)
4. Selat Makassar dan Laut Flores	929,72	655,45	Underfishing (70,50%)
5. Laut Banda	277,99	228,48	Underfishing (82,19%)
6. Laut Seram dan Teluk Tomini	590,82	197,64	Underfishing (33,46%)
7. Laut Sulawesi dan Samudra Pasifik	632,72	237,11	Underfishing (37,47%)

8. Laut Arafuru	771,55	263,37	Underfishing (34,14%)
9. Samudra Indonesia	1.076,89	623,78	Underfishing (57,92%)
TOTAL NASIONAL	6.409,21	4.069,42	Underfishing (63,49%)

Sumber: DKP RI, 2005

## F. DIMENSI STRATEGIS

Kawasan pesisir merupakan “halaman depan” negara maritim Indonesia. Sebagai “halaman depan” kawasan pesisir merupakan garda terdepan bagi keamanan kedaulatan negara. Jika kawasan pesisir ini kurang diperhatikan dan masyarakat yang hidup di wilayah tersebut secara sosial ekonomi kekurangan, maka kondisi demikian akan menjadi lahan subur timbulnya berbagai kegiatan penyelundupan atau subversi ekonomi, politik, dan keamanan. Hal ini dapat diberikan contoh sebagai berikut.

1. Kawasan pulau-pulau di Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara, yang berdekatan dengan Filipina Selatan merupakan kawasan yang leluasa untuk penyelundupan senjata gelap, bagi pihak-pihak yang terlibat konflik agama Islam-Kristen di Ambon dan Poso. Kawasan tersebut sangat terpencil dan tidak diperhatikan oleh Pemerintah Indonesia. Sebagian penduduknya juga bekerja di Filipina Selatan, Davao-Mindanou, sebagai pekerja kasar, seperti Satpam, konstruksi, dan buruh kasar lainnya.
2. Lepasnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan di Kalimantan Timur, ke wilayah Malaysia, tidak terlepas dari pengabaian pengawasan dan pembangunan kedua pulau tersebut oleh Indonesia, sehingga akhirnya “diopeni” oleh Malaysia dengan membangun wisata bahari kelas internasional. Karena Malaysia sudah lama “ngopeni” kedua pulau tersebut dalam sidang di Mahkamah Internasional menjadi alasan kuat yang memenangkan Malaysia sebagai pemilik kedua pulau tersebut, padahal secara historis dari arsip-arsip kekuasaan kolonial Belanda, seharusnya menjadi milik Pemerintah Indonesia.

3. Di Kepulauan Natuna, Kalimantan Barat, nelayan-nelayan asing dari Thailand, Malaysia, dan Vietnam bisa beroperasi leluasa dan ilegal memasuki wilayah perairan Indonesia, karena memperoleh dukungan dari masyarakat nelayan lokal yang miskin. Para nelayan asing tersebut sering memberi bantuan peralatan tangkap dan memberi ikan kepada nelayan-nelayan miskin tersebut. Jika akan berlangsung operasi keamanan laut, para nelayan lokal ini memberikan informasi kepada nelayan asing, sehingga nelayan asing sulit ditangkap.
4. Kasus-kasus serupa juga terjadi di wilayah perbatasan lain, seperti di perairan Pulau Pasir di Laut Timor, Perairan Utara Aceh, Laut Arafuru.

Karena itu, pembangunan kelautan dan perikanan merupakan hal yang sangat strategis untuk mensejahterakan masyarakat pesisir. Jika pembangunan tersebut berdampak positif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat pesisir, niscaya masyarakat pesisir ini akan menjadi ujung tombak untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia.

## CATATAN KRITIS:

1. Potensi sumber daya kemaritiman nasional belum dikelola secara optimal dan berkelanjutan. Masa depan bangsa akan ditentukan oleh eksistensi sumber daya maritim.
2. Belum menjadi wacana nasional untuk memantapkan paradigma pembangunan nasional berbasis maritim. Luas perairan laut lebih besar (62%) daripada luas daratannya (38%).

Dasar pemikiran lainnya:

- Negara Kepulauan terbesar di dunia: 17.508 pulau besar-kecil.
  - Panjang garis pantai 81.000, terpanjang di dunia No. 2 setelah Kanada.
  - Luas laut (perairan teritorial + perairan Nusantara): 3,1 juta Km<sup>2</sup>.
  - Luas perairan ZEE 2,7 Km<sup>2</sup>.
3. Orientasi pembangunan Orde Baru lebih ke darat, dengan memperkuat sektor pertanian dan pada akhir Orde Baru, sektor pertanian ini terus terpuruk. Kita bergantung pada produk-produk pertanian negara tetangga. Faktor politik memainkan peranan penting terhadap orientasi pembangunan ke daratan ini.



## STRUKTUR SOSIAL MASYARAKAT PESISIR

### I. PENGERTIAN

A. Struktur Sosial : Pola dari hak dan kewajiban para pelaku dalam suatu sistem interaksi yang terwujud dari rangkaian hubungan sosial yang relatif stabil dalam suatu jangka waktu tertentu dan dalam situasi sosial tertentu.

- Pengertian hak dan kewajiban para pelaku dikaitkan dengan masing-masing status/kedudukan dan peranan (*role*) para pelaku dalam suatu interaksi sosial.
- Status dan peranan bersumber pada sistem penggolongan yang ada dalam kebudayaan masyarakat yang bersangkutan dan yang berlaku menurut masing-masing PRANATA dan situasi-situasi sosial dimana interaksi sosial itu terwujud.
- Sebuah situasi sosial terdiri atas serangkaian aturan-aturan atau norma-norma yang mengatur penggolongan para pelaku menurut status dan peranannya, yang membatasi macam tindakan-tindakan yang boleh dan yang tidak boleh, serta yang seharusnya diwujudkan oleh para pelakunya.
- Biasanya sebuah situasi sosial menempati suatu ruang/wilayah tertentu untuk mewujudkan interaksi sosial tertentu, seperti perkuliahan di ruang kelas, SEMINAR GAY, konsultasi skripsi, makan malam bersama keluarga, kursus menggambar, dan sebagainya.
- Corak dari suatu struktur sosial ditentukan oleh kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan, seperti pranata-pranata sosial budaya dalam kaitannya dengan

karakteristik lingkungan hidup yang nyata dihadapi oleh warga masyarakat yang bersangkutan.

- Struktur sosial itu bersifat ABSTRAK. Ia hanya bisa terlihat dalam perilaku interaksi sosial.
- Dalam kehidupan sehari-hari setiap orang akan memasuki banyak struktur sosial, sebagai konsekuensi dari dinamika individual/dinamika sosial dan pencapaian beragam kepentingan/tujuan kehidupan.

## B. Contoh-contoh Kasus dalam Situasi Sosial

- Makan malam keluarga
- SEMINAR GAY
- Interaksi di pasar tradisional/super market

C. Struktur sosial dapat digunakan untuk mengkaji gejala-gejala sosial yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Misalnya, studi antropologi kesehatan tentang penyakit gondok pada masyarakat di dataran tinggi Dieng, yang kebanyakan diderita oleh kaum perempuan. Struktur sosial sebagai “pintu masuk atau faktor penentu” untuk memahami timbulnya penyakit tersebut.

## II. STRUKTUR SOSIAL MASYARAKAT NELAYAN

NELAYAN adalah orang/kelompok orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan binatang laut (IKAN) dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual. Orang yang melakukan pekerjaan, seperti membuat perahu/jaring, pedagang ikan, dan mengangkut ikan tidak digolongkan sebagai nelayan.

Dalam struktur masyarakat pesisir nelayan merupakan salah satu entitas sosial, di samping kelompok sosial lainnya, yang bekerja di sektor perdagangan, jasa, swasta/negara, dan lain-lain.

Tipologi desa pesisir cukup beragam dilihat dari komposisi sumber daya alam yang ada, sehingga melahirkan tipologi masyarakat yang beragam. Kalau desa nelayan berarti sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai nelayan.

➤ Latar Belakang Sosial-budaya dan Lingkungan

- (a) Apresiasi yang tinggi terhadap keberhasilan hidup dan kekayaan materi. Karena hal ini dicapai dengan kerja keras dan pengorbanan/risiko yang besar.
- (b) Penghargaan yang tinggi terhadap etos kerja, profesionalisme, dan tanggung jawab sosial, seperti norma rekrutmen pemimpin awak perahu, pandhiga, dan berhenti kerja (*ambu lako*).
- (c) Penghargaan yang tinggi terhadap status sosial dan kehormatan sosial.
- (d) Penghargaan yang tinggi terhadap kapital budaya (*cultural capital*) religius, seperti pada ulama/kyai atau identitas kehajian.
- (e) Hubungan PATRON-KLIEN yang kuat sebagai konsekuensi dari pekerjaan nelayan melakukan kegiatan penangkapan (*fishing*), risiko pekerjaan yang tinggi, dan karakteristik lingkungan/sumber daya alam (pesisir/laut).

➤ Kategori sosial yang berpengaruh dalam menentukan struktur sosial masyarakat nelayan adalah:

- (1) PEMILIK PERAHU/KAPAL IKAN (NELAYAN PEMILIK)
- (2) PEMIMPIN AWAK PERAHU (NAKHODA) DALAM OPERASI PENANGKAPAN. SETIAP DAERAH MEMILIKI NAMA YANG BERAGAM.
- (3) NELAYAN BURUH (PANDHIGA)
- (4) PEDAGANG IKAN - TERKAIT NO. 1  
(PENGEPUK/PEDAGANG PERANTARA/PEMINDANG/PEMILIK PERAHU)

- Interaksi sosial dalam struktur sosial tersebut didasarkan pada norma-norma yang ada, hak dan kewajiban masing-masing pelaku, yang ditentukan oleh status dan peranan pelaku dalam interaksi sosial tersebut.

Catatan:

- No. 1, 2, 3 merupakan basis struktur sosial masyarakat nelayan, khususnya seperti terlihat pada organisasi pe-nangkapan/pranata penangkapan. Nelayan merupakan subjek sosial-ekonomi terpenting dalam kehidupan masyarakat pesisir.
- Kategori pedagang ikan bukan termasuk NELAYAN.
- Jika kita membuat stratifikasi sosial masyarakat pesisir unsur pedagang ikan bisa dimasukkan.

### III. STRUKTUR SOSIAL: DINAMIKA MASYARAKAT NELAYAN/PESISIR

- (1) Potensi sumber daya laut, khususnya perikanan dan pesisir sebagai penggerak dinamika sosial-perekonomian masyarakat.
- (2) Kedudukan nelayan, khususnya pemilik perahu, merupakan subjek produksi tangkapan yang dominan/menentukan.
- (3) Nelayan pemilik memiliki kemampuan akses pasar, sumber-sumber permodalan, dan teknologi penangkapan, sehingga mengambil peranan yang besar dalam dinamika masyarakatnya.
- (4) Dalam memainkan peranan di atas (No. 3), penyedia modal informal, khususnya di desa-desa nelayan yang belum berkembang pesat, seperti pedagang ikan atau pangamba' untuk nelayan Madura atau pappalele untuk nelayan Bugis mengambil peranan yang sangat penting.
- (5) Dalam posisi kemitraan kerja sama: nelayan pemilik dan pedagang perantara merupakan pelaku utama perubahan sosial ekonomi di desa-desa nelayan.

### **STRUKTUR EKONOMI MASYARAKAT PESISIR**

#### I. PENGERTIAN

Struktur ekonomi adalah susunan dan eksistensi sumber daya ekonomi-lingkungan yang menjadi tumpuan hidup masyarakat nelayan serta bagaimana strategi masyarakat mengelola sumber daya tersebut untuk menjaga kelangsungan kehidupannya.

##### 1a. Tipologi Desa Pesisir

Dilihat dari komposisi potensi sumber daya lingkungan

- Tipe bahan makanan yaitu desa-desa pesisir yang sebagian besar atau seluruh penduduknya bermatapencarian pokok sebagai petani sawah/peladang, bergantung kondisi pertanian yang ada.
- Tipe tanaman industri, yaitu desa-desa pesisir yang sebagian besar atau seluruh penduduknya bermatapencarian pokok sebagai petani tanaman industri, seperti petani kelapa atau tanaman lainnya.
- Tipe nelayan-empang, yaitu desa-desa pesisir yang sebagian besar atau seluruh penduduknya bermatapencarian pokok sebagai penangkap ikan laut/pembudidaya ikan (petani tambak)
- Tipe niaga dan transportasi, yaitu desa-desa pesisir yang sepanjang tahun disandari perahu-perahu dari berbagai daerah dalam rangka perdagangan antarpulau atau antarwilayah.
- Tipe campuran, yaitu desa-desa pesisir yang kelompok-kelompok penduduknya bermatapencarian beragam, seperti nelayan, petani tambak, petani tanaman industri, petani sawah, dan pedagang/wirausahawan.

1b. Desa nelayan adalah desa-desa yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai nelayan, dengan melakukan kegiatan penangkapan di laut (*fishing*). Di desa-desa demikian, biasanya ditemukan juga petani-petani tambak atau pembudi daya perairan yang membudidayakan udang, bandeng, dan kerapu.

## 1c. Posisi Geografis Desa Nelayan: Dinamika Sosial Ekonomi

- Desa Pedalaman, yang ciri-cirinya: (1) jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal, (2) sarana/prasarana ekonomi terbatas, dan (3) dinamika sosial ekonomi masyarakatnya rendah, karena bertumpu sepenuhnya pada hasil tangkapan.
- Desa “Perkotaan”, yang ciri-cirinya: (1) dekat atau menyatu dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal, (2) sarana/prasarana ekonomi “cukup memadai”, dan (3) dinamika sosial ekonomi masyarakatnya “relatif tinggi” karena keragaman aktivitas ekonomi lokal, selain kegiatan penangkapan dan perdagangan ikan.

## II. PERIKANAN TANGKAP: PILAR EKONOMI NELAYAN

### 2a. Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Ekonomi Nelayan

- Kualitas sumber daya manusia
- Potensi sumberdaya alam dan musim
- Kapasitas modal
- Tingkat teknologi
- Akses pasar
- Relasi kebijakan (politik)

### 2b. Perikanan Rakyat (Artisanal Fisheries)

Dilihat dari skala usahanya, sebagian besar nelayan Indonesia termasuk ke dalam kelompok perikanan rakyat. Mereka disebut sebagai nelayan kecil atau nelayan tradisional. Ciri usaha ekonomi mereka adalah sebagai berikut:

1. Skala usaha kecil (*petty commodity producers*).
2. Kualitas teknologi penangkapan bersifat tradisional, seperti perahu pancingan dan payangan.
3. Kualitas sumber daya manusia rendah.
4. Kemampuan modal dan akses modal terbatas.
5. Akses pasar terbatas.
6. Ketergantungan pada kegiatan melaut sangat tinggi.
7. Sifat usaha bergantung musim (kondisi alam).
8. Orientasi ekonomi rendah.

Hanya sebagian kecil atau sekitar 20% nelayan Indonesia yang tergolong dalam nelayan besar atau nelayan modern. Mereka mengoperasikan kapal-kapal *trawl*, pukat cincin, dan jenis pukat yang lain. Ciri-ciri usaha mereka adalah kebalikan dari ketujuh ciri-ciri di atas.

### III. JARINGAN PERDAGANGAN IKAN

#### 3a. Pelaku Perdagangan

- Nelayan sebagai produsen ikan.
- Pedagang: (1) pedagang perantara, (2) pedagang kecil, dan (3) pedagang ekspor/antarkota atau pedagang besar. Biasanya untuk ikan segar.
- Industri pengolahan: (1) industri pemindangan/pengeringan berskala kecil-menengah dan (2) industri sarden/pengalengan.

3b. Ikan tidak memiliki harga dasar seperti pada harga dasar gabah di kalangan petani.

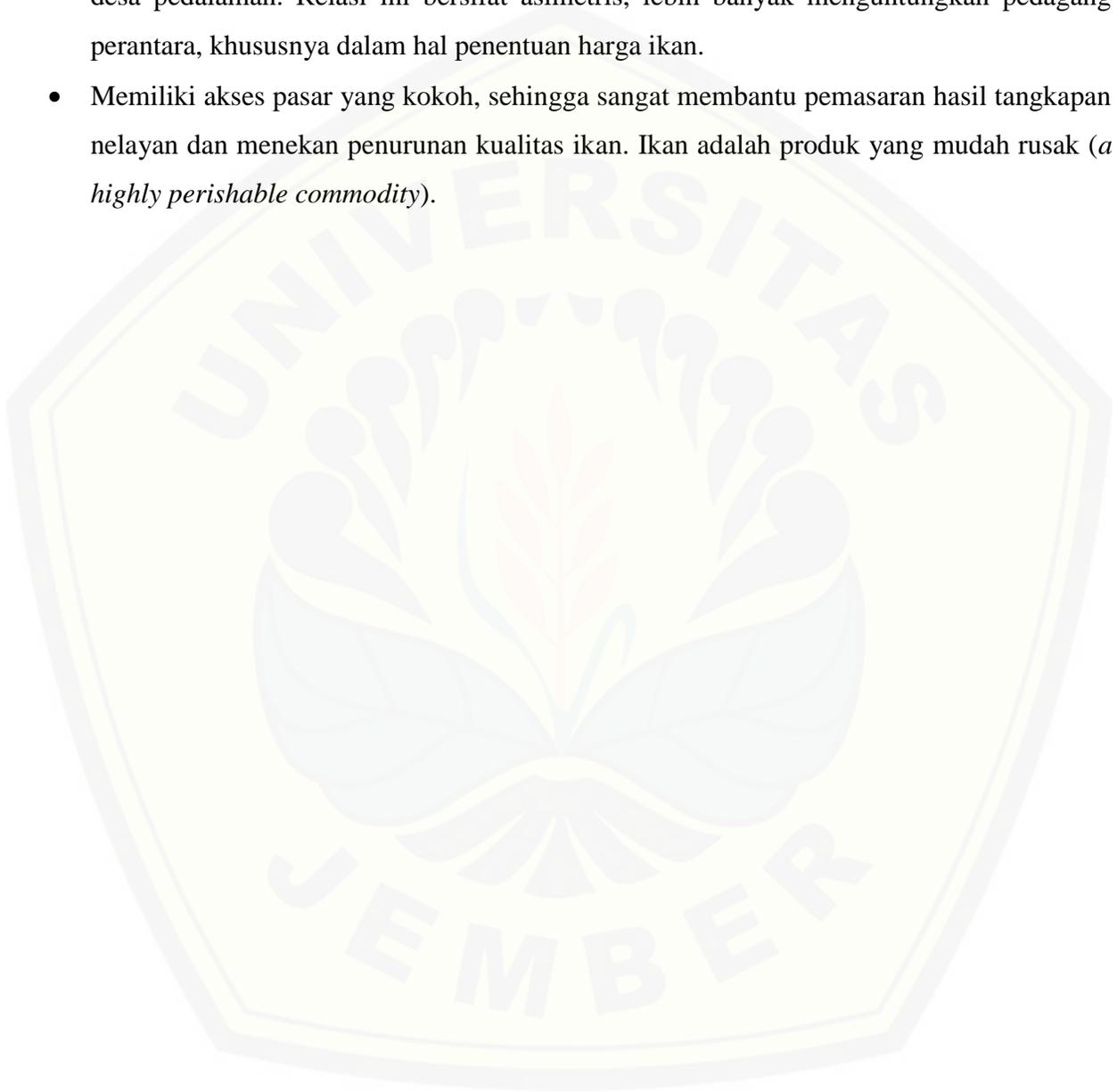
#### 3c. Model-model Jaringan Perdagangan Ikan

1. Nelayan - Konsumen (untuk nelayan-nelayan kecil dengan tingkat produktivitas terbatas). Isteri nelayan yang menjual langsung ikan segar hasil tangkapan tersebut).
2. Nelayan – Pedagang Perantara – Konsumen.
3. Nelayan – Pedagang Perantara – Pedagang Kecil/Eceran- Konsumen.
4. Nelayan – Pedagang Perantara – Pedagang Besar di Kota – Pedagang Eceran- Konsumen.
5. Nelayan – Pedagang Perantara – Pedagang Besar di Kota – Pedagang Eceran- Konsumen.
6. Nelayan – Pabrik Pengalengan – Konsumen (Di Muncar kedudukan dan fungsi pengusaha pabrik pengalengan seperti *pangamba'*).
7. Nelayan – Pemindang/Pengering ikan- Konsumen.
8. Nelayan – Pemindang/Pengering ikan – Pedagang Besar di Kota (Juragan penerima) – Pedagang kecil - Konsumen.
9. Nelayan – Pemindang/Pengering ikan – Pedagang Besar di Kota (Juragan penerima) – Konsumen.

## IV. PEDAGANG PERANTARA: PENGGERAK EKONOMI

### DI DESA-DESA NELAYAN

- Penyedia modal utama nelayan (moneylender), khususnya bagi nelayan pemilik.
- Relasi sosial ekonomi pedagang perantara dan nelayan sangat kuat, khususnya di desa-desa pedalaman. Relasi ini bersifat asimetris, lebih banyak menguntungkan pedagang perantara, khususnya dalam hal penentuan harga ikan.
- Memiliki akses pasar yang kokoh, sehingga sangat membantu pemasaran hasil tangkapan nelayan dan menekan penurunan kualitas ikan. Ikan adalah produk yang mudah rusak (*a highly perishable commodity*).



### ORGANISASI KERJA NELAYAN

#### Pengantar

- Satuan Tempat/Wadah/Sarana Bekerja: PERAHU/KAPAL
- Perahu/Kapal: Simbol Kekayaan Kapital dan Status Sosial
- Perahu/Kapal: Sarana strategis dalam kegiatan penangkapan yang diperlakukan nelayan sebagai “makhluk hidup”, seperti ditunjukkan dengan makna upacara pembuatan perahu/kapal secara tradisional.
- Dalam kegiatan perikanan, Pemerintah Daerah mengeluarkan Izin Usaha Perikanan (IUP) yang diatur melalui Perda.

#### 5.1a Teknologi dan Wilayah Tangkap (*Fishing Grounds*)

Jenis alat tangkap dan teknik penangkapan adalah sebagai berikut.

##### A. Alat Tangkap yang Memakai Jaring (*Netting Gear*)

1. *Gill net*, yaitu semua jenis jaring (*surface gill net, mid water gill net, bottom gill net, dan sweeping gill net*), kecuali jaring yang menangkap ikan secara terbelit.
2. *Entangle net*, yaitu jaring yang menangkap ikan secara terbelit, seperti *tuna drift net* dan *tramel net*.
3. *Towing net*, yaitu kelompok jaring yang dalam operasinya ditarik atau didorong dan berkantong, misalnya *beach seine, cantrang, trawl*.
4. *Lift net*, yaitu semua jenis jaring angkat, misalnya *floating lift net, bottom lift net*.
5. *Surrounding net*, yaitu menangkap ikan dengan melingkari gerombolan ikan dan ikan masuk ke kantong atau kantong bentukan, misalnya *purse seine*.
6. *Covering net*, yaitu menangkap ikan dengan menutup dari atas, umumnya dioperasikan di perairan dangkal, misalnya jala lempar, *lantern net (net berbingkai)*.

7. *Trap net*, yaitu menangkap ikan dengan perangkap, yang berukuran kecil, sedang, dan besar. Berdasarkan posisinya dibagi menjadi: *portable trap net* dan *girdling barrier*, misalnya jenis-jenis bubu dan sero.

## B. Alat Tangkap Pancing

Yaitu semua jenis alat tangkap pancing, termasuk *long line*, misalnya *pole and line*, *trolling line*, *drift line*, *bottom line*.

## C. Alat Penangkapan Lainnya

Yaitu alat tangkap yang tidak termasuk dalam kelompok alat tangkap di atas. Alat tangkap tersebut antara lain, *harpoons* dan *spears* (menangkap ikan dengan menggunakan panah dan tombak), menggunakan skop, *electrical fishing*, dan lain-lain.

### 5.1b Wilayah Penangkapan

Secara umum, wilayah penangkapan dibagi menjadi wilayah perairan pantai dan lepas pantai. Namun demikian, Menteri Pertanian RI mengeluarkan SK No. 392/Kpts/IK.120/4/99, tentang jalur-jalur penangkapan agar eksploitasi perikanan dilakukan secara adil, merata, dan terhindar dari konflik antarkelompok nelayan. Jalur penangkapan adalah sebagai berikut.

- Jalur penangkapan Ia (Surut terendah, tepi pantai, sampai dengan 3 mil laut).
- Jalur penangkapan Ib (3 mil sampai dengan 6 mil laut)
- Jalur penangkapan II (6 mil sampai dengan 12 mil laut).
- Jalur penangkapan II (12 mil) sampai dengan batas terluar perairan ZEE Indonesia.
- Jalur penangkapan di luar perairan ZEE Indonesia.
- ZEEI diresmikan berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982.

Nb. Perhatikan peta!

### Kegiatan Penangkapan:

1. Pemanfaatan sumber daya perikanan pada setiap jalur disesuaikan dengan ukuran kapal/perahu dan jenis alat tangkap.

2. Nelayan memiliki pengetahuan lokal yang berkaitan dengan tempat-tempat penangkapan yang potensial, yang diperoleh melalui penanda: posisi bintang di langit, gunung-gunung di darat, mercu suar, warna air laut, kondisi arus, atau tanda-tanda yang lain.
3. Tempat-tempat penangkapan seperti “desa-desa ikan”. Bagi nelayan-nelayan Situbondo, nama desa-desa ikan tersebut adalah *landaur* (paling ujung timur), *tenjha'*, *cadha'*, *mundhung*, *cebu'*, *sepasar*, *semanggar*, *seghighir*, *seghimeng*, *sangolah*, *tonijhin*, *capeng*, *seprao*, *sekembang*, *setapai*, *janur*, *ghundhin*, *selaotan*, *senyonya*, *jin setong*, *jin dhuwa'*, *jin telo'*, dan *gendhingan* (paling barat).

## 5.2a Sistem Rekrutmen Tenaga Kerja

Aspek kekerabatan (dan hubungan ketetanggaan), khususnya untuk perahu-perahu kecil (2-6 awak perahu) karena beberapa alasan.

- Rekrutmen tenaga kerja pada perahu-perahu besar (12-30-an awak perahu, seperti perahu slerek/payang) lebih rasional dan objektif.
- Sehat jasmani dan rohani, jujur, badan kuat untuk bekerja keras dan disiplin kerja.
- Diikat oleh pinjaman ikatan dengan pemilik perahu. Tetapi ada juga nelayan buruh yang tidak memiliki pinjaman ikatan.
- Krisis tenaga kerja bisa terjadi jika di desa nelayan sulit diperoleh tenaga kerja, karena tidak seimbangnya jumlah tenaga kerja dengan kebutuhan atau karena nelayan sudah pindah pekerjaan setelah pekerjaan melaut kurang memberi keuntungan ekonomis. Dalam kondisi demikian biasanya diambilkan dari tenaga kerja di sekitar desa nelayan, yang biasanya para petani.

## 5.2b Sistem Bagi Hasil

- Konsep sistem bagi hasil sangat variatif bergantung pada aspek sosial budaya, jenis perahu, dan alat tangkap yang dioperasikan.

- Sistem bagi hasil merupakan strategi adaptasi usaha nelayan menghadapi tantangan kondisi lingkungannya.
- Pada umumnya, sistem bagi hasil dibagi menjadi *maron* (50:50) atau *telon* (35:65), dengan variasinya.
- Sistem bagi hasil tidak mereferensi ketentuan formal dari pemerintah, tetapi memiliki pola-polanya, yang berlaku di desa nelayan setempat. Pola-pola ini belum tentu sama dengan yang berlaku di desa nelayan lain.

### 5.3a Sistem Pembagian Kerja

Bagian ini diberikan contoh tentang sistem pembagian kerja pada perahu slerek nelayan Besuki (lihat, Kusnadi, 2000: 107-108).

Tabel  
Pembagian kerja dan Perolehan Hasil

No.	Spesialisasi Kerja	Jumlah <i>Pandhiga</i> (orang)	Jumlah <i>Sara'an</i>
1.	Jhuragan (Juragan Laut/Nakhoda)	1	4
2.	Kel-bekel	1	2
3.	Madara' prao	2	4
4.	Tokang jaga'an	2	4
5.	Tokang jaga mesin	4	5
6.	Tokang pancer	3	4
7.	Tokang lampu	6	9
8.	Tokang ngoras aeng	2	3
9.	Tokang nyobeng	1	1
10.	Tokang ngereng	4	6
11.	Tokang nggorit	7	10
12.	Tokang du'um	1	1
	Jumlah	34	45

## 5.3b Kepemimpinan Perahu

Juragan/Juragan Laut/Nakhoda adalah orang yang bertanggung jawab penuh dalam operasi penangkapan. Ia bertanggung jawab kepada pemilik perahu (Juragan Darat atau Orenga). Juragan laut membawahi pada pandhiga (nelayan buruh).

Secara umum, syarat-syarat pemimpin/kepemimpinan pada masyarakat pesisir utara Jawa yang diperoleh berdasarkan kajian sastra/tradisi lisan yang banyak dipengaruhi oleh Islam, adalah sebagai berikut (lihat Widayati, 2001):

1. Siap menolong siapa saja yang meminta bantuan.
2. Mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri.
3. Dermawan kepada semua orang.
4. Selalu menuntut ilmu dunia dan akhirat agar kehidupan seimbang.
5. Tidak berambisi terhadap jabatan atau kedudukan walaupun banyak berjasa.
6. Rendah hati, tetapi tidak rendah diri (minder).
7. Sangat benci penindasan dan berbuat adil kepada siapa saja.
8. Rajin bekerja dan beribadah, khususnya sholat 5 waktu.
9. Sabar dan bijaksana.
10. Berusaha menyenangkan orang lain.

Pusat-pusat integrasi sosial masyarakat pesisir utara Jawa adalah LANGGAR, SUMUR, DAN MAKAM (WALI).

Di kalangan masyarakat nelayan, untuk menjadi seorang pemimpin perahu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

- Berpengetahuan luas tentang kelautan/perikanan.
- Jujur, mampu, dan cakap memimpin.
- Disiplin kerja .
- Bijaksana, terbuka, dan demokratis.
- Tanggung jawab.

- Berorientasi pada prestasi.
- Tahu diri dan memiliki kepekaan sosial (Seperti budaya mundur (*toron lako*) pada nelayan Madura di Besuki. Wapres Try Sutrisno mengatakan bahwa Indonesia tidak mengenal budaya mundur dari jabatan. Pernyataan ini dimuat dalam *KOMPAS*, 13 April 1994).

## 5.4 Organisasi Kerja sebagai Unit Sosial

- Sebagai kelompok sosial yang kohesif, ada solidaritas sosial, dan memiliki mobilitas tinggi.
- Juragan laut sebagai salah seorang tokoh masyarakat nelayan yang diperhitungkan.
- Dapat menjadi basis pemberdayaan sosial atau target politik.



### **ARTI STRATEGIS NEGARA BAHARI**

#### A. International Institution

- United Nation Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS '82).
  - Merupakan pengaturan laut internasional untuk membangun pemahaman bersama dalam memanfaatkan lautan demi kemaslahatan umat manusia.
  - Menurut UNCLOS '83, luas wilayah perairan Indonesia 3,1 juta km<sup>2</sup> terdiri dari perairan kepulauan 2,8 juta km<sup>2</sup> dan wilayah laut 0,3 juta km<sup>2</sup>.
  - ZEE 2,7 km<sup>2</sup>.

#### B. Kerja sama dalam Organisasi Internasional

- International Maritime Organization (IMO)
- International Hydrographic Organization (IHO)
- Sea Lane of Communication (SLOC)
- Sea Lane of Oil Trade (SLOT)
- Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMTGT)
- Indonesia-Malaysia-Singapore Growth Triangle (IMSGT)
- Singapore-Johor-Riau (SIJORI)
- Australia-Indonesia Development Area (AIDA)
- Kerja sama antar negara membuka peluang bagi Indonesia untuk memacu kemajuan sosial-ekonomi di tiap kawasan segi tiga pertumbuhan

## C. International Issues

- Lingkungan
- Transportasi
  - 70% perdagangan dunia diangkut oleh kapal laut.
- Pariwisata
- Keamanan
- Batas wilayah

## D. Kepentingan Nasional di Laut

### 1. Aspek Pemukiman

- 4.735 desa dari 64.439 desa di Indonesia merupakan desa pesisir
- 22% penduduk Indonesia bermukim di pesisir
  - Masyarakat tradisional
  - Status ekonomi rendah
  - Tingkat pendidikan rendah (Sensus 1990)
    - » 79,05 % tenaga kerja perikanan tidak tamat SD
    - » 17,59 % tamat SD
    - » 1,9 % tamat SLTP
    - » 1,37 % tamat SLTA
    - » 0,03 % tamat Dipl & Sarjana.

### 2. Aspek Pelayaran

Perusahaan pelayaran nasional sulit berkembang, karena:

1. Kurang modal
  2. Banyak kapal asing
  3. Persyaratan FOB (Freight on Board) dan Cost Insurance Freight (CIF) masih kurang.
  4. pengembangan jaringan infrastruktur pelabuhan belum optimal
  5. Tingkat kecukupan dan keandalan jaminan keselamatan pelayaran nasional masih rendah.
  6. Orientasi industri perkapalan nasional pada armada skala besar.
  7. Industri perkapalan tradisional sulit memasarkan produknya.
  8. Perlindungan hak cipta (intellectual property right) atas budaya pembuatan kapal
    - Hal cipta Perahu Phinisi dimiliki pihak asing.
3. Aspek perikanan laut
- Hasil perikanan tangkap
    - tahun 1997 6,7 juta ton
    - tahun 1999 6,2 juta ton
    - tahun 2000 6,1 juta ton
  - Perairan utara Jawa *overexploited*
  - Kapal asing illegal di perairan Nusantara
    - Kerugian negara 1,87 – 4 milyar US dollar/tahun
    - Pencurian ikan, BBM, pajak, selisih ekspor-impor, tarif.
  - Potensi ZEE baru dimanfaatkan 35%

## 4. Aspek pariwisata bahari

- Taman Laut Nasional Bunaken (Sulut), Banda Neira (Maluku), Kepulauan Tukang Besi (Sultra), Kepulauan Togian (Sulteng), Pantai Merah (NTT), Cendrawasih (Papua), Wakatobi (Sulsel).
  - 350 spesies ikan
  - 250 spesies terumbu karang
- Usaha wisata bahari yang sukses dikelola pihak asing
- Sarana dan prasarana wisata bahari terbatas:
  - Akomodasi
  - Transpotasi
  - Restoran
  - Telekomunikasi
  - Sanitasi
  - Jaminan keselamatan dan kenyamanan
  - Jaringan informasi dan pemasaran ke pasar global

## 5. Aspek industri dan jasa maritim

Industri perkapalan menurut Inpres No. 10/Tahun 1984:

- Industri galangan kapal (membuat kapal 10 Gross Ton); (perbaikan kapal 20 GT)
- Penunjang galangan kapal (produksi mesin dan peralatan kapal 40%)
- Bangunan lepas pantai

SDM Industri perkapalan

- PT. PAL Surabaya 400 siswa/tahun bidang software & hardware

- PT. Kodja Jakarta 100 siswa/tahun bidang software

## 6. Pertambangan dan energi

Penambangan minyak bumi dan gas alam menyumbang devisa terbesar bagi negara.

- a. Lokasi di perairan lepas pantai
- b. Di Perairan pantai (pantura Jabar, Arun/Aceh, Bontang/Kaltim.
- c. Potensi perbedaan suhu air laut/Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) (berasal dari gelombang dan pasang surut air laut)

## 7. Potensi cekungan laut

- a. Mengandung 106,2 milyar barel.
- b. 16,76 milyar barel sudah diketahui dengan pasti lokasinya
- c. 7,5 milyar barel sudah dieksploitasi.

Kandungan Nodul-Mangan (batu-batuan nikel, perak, kobal, mangan, tembaga, seng, besi) di perairan laut dalam 2.000 m-5.000 m (di Samodra Pasifik dan Samodra Hindia).

### PERSPEKTIF NEGARA PULAU & MARITIM

#### 1. Archipelago State

- archipelago berasal dari bahasa Yunani yaitu – arkhi - yang diartikan sebagai penguasaan
- Wikipedia mengartikan arkhi sebagai "chief" atau kepala
- pélagos diartikan gugusan kepulauan (rangkaiian pulau atau klaster kepulauan).
- Jumlah pulau 17.508 buah

#### 2. Maritime State

- **Kelautan** diartikan sebagai wadah, yaitu sebagai hamparan air asin yang sangat luas yang menutupi permukaan bumi.  
→ hanya melihat fisik laut dengan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
- **Maritim** sebagai berkenaan dengan laut; berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut (Kamus Besar BI).  
→ melihat laut dalam konteks geopolitik, terutama posisi Indonesia dalam persilangan antara dua benua dan dua samudra serta merupakan wilayah laut yang sangat penting bagi *keamanan* dan *perdagangan* dunia. Arshad, R (2012)  
<http://www.shnews.co>

Menurut Sri Sultan HB X (2012),

([article.wn.com](http://article.wn.com))

- **Doktrin negara kepulauan** adalah cara pandang, negara terdiri dari rangkaian pulau-pulau dan daratan yang terpisah oleh lautan
- **Doktrin negara maritim** adalah negara terdiri dari wilayah lautan yang menghubungkan pulau-pulau di dalamnya ([article.wn.com](http://article.wn.com))
- Negara Maritim

- Luas laut 5,8 km<sup>2</sup>
- panjang pantai 81.000 km

## Data & Sejarah Negara Negara Kepulauan/Bahari (Archipelagic State)

- United Nation Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS '82).
- Ratifikasi UNCLOS '82 ke dalam UU No. 17/1985.
  - Letak wilayah 95-141 BT & 60' LU-110'LS.
  - Luas wilayah perairan laut 7,9 juta km<sup>2</sup> (termasuk ZEE)
  - Panjang pantai 81.000 km.
  - Menurut UNCLOS '83, luas wilayah perairan Indonesia 3,1 juta km<sup>2</sup> terdiri dari perairan kepulauan 2,8 juta km<sup>2</sup> dan wilayah laut 0,3 juta km<sup>2</sup>.
  - ZEE 2,7 juta km<sup>2</sup>. (Pramono, 2005)

## Bangsa Bahari

- **Pengertian bahari** sebenarnya merujuk pada kehidupan sekitar laut beserta dengan segenap aspek-aspeknya

## Sejarah bahari

- Cadas gua prasejarah di Pulau Muna, Seram, Arguni tahun 10.000 SM: lukisan perahu layar
- Perantau Nusantara berlayar 6.500 km ke bekas Kerajaan Marina (Madgaskar).
- Kerajaan dengan ciri-ciri kemaritiman:
  - Sriwijaya (683-1030)
  - Majapahit (1293-1478).
  - Relief Candi Borobudur (peninggalan Kerajaan Mataram) berupa perahu layar.
  - Kerajaan Singasari (Raja Kertanegara)

- Kerajaan Majapahit (Raja Raden Wijaya).
- Perjanjian Giyanti (1755) antara Belanda (VOC) dengan Raja Surakarta dan Yogyakarta:

Kedua raja keturunan Mataram tersebut menyerahkan perdagangan laut, hasil bumi dan rempah-rempah dari wilayahnya kepada Belanda.

## Dampak Perjanjian Giyanti

- Penurunan semangat/jiwa bahari
- Perubahan dari budaya maritim ke budaya teresterial.

## Kebangkitan kembali sebagai negara maritim

1. Tahun 1957: Wawasan Nusantara (PM Juanda):
  - Azas Negara Nusantara (Archipelagic State): wilayah laut merupakan satu keutuhan dengan wilayah darat, udara, dasar laut dan tanah yang ada di bawahnya, serta seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya yang tidak bisa dipisah-pisahkan.
  - Pengakuan Negara Nusantara pada PBB (UNCLOS '82), yang berlaku efektif pada tanggal **16 Nopember** 1984.
2. Tahun 1998: Deklarasi Bunaken (Presiden BJ Habibie): Visi pembangunan kelautan Indonesia: laut merupakan peluang, tantangan dan harapan untuk masa depan persatuan, kesatuan dan pembangunan bangsa Indonesia.
3. Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad (tahun 2010)

## Revolusi Biru

Revolusi biru adalah perubahan mendasar cara berpikir dari daratan ke maritim dengan konsep pembangunan berkelanjutan untuk peningkatan produksi kelautan dan perikanan melalui program minapolitan yang intensif, efisien dan terintegrasi guna peningkatan pendapatan rakyat yang adil, merata dan pantas.

### **MODERNISASI & FORMASI SOSIAL NELAYAN**

Kreativitas dalam masyarakat, karena:

- Kesadaran atas kekurangan dalam masyarakat
- Kesadaran untuk meningkatkan mutu
- Adanya sistem insentif (kehormatan, status, materi)
- Krisis dalam masyarakat.

Formasi sosial adalah cara produksi (mode of production), terdiri dari

- Kekuatan produksi (alat kerja, kecakapan & pengalaman)
- Hubungan produksi (hubungan kerja sama dan pembagian kerja dalam proses produksi)

Pengaruh modernisasi perikanan

- Positif
  1. Peningkatan produksi perikanan
  2. Peningkatan pendapatan nelayan
  3. Tersedia lapangan kerja baru.
- Negatif
  1. Kesenjangan sosial-ekonomi (kusnadi, 2000)
  2. Konflik (Satria, 2001)

Hubungan produksi, ditentukan oleh

- Teknologi, menimbulkan kekuatan produksi
- Spesialisasi (karena tuntutan efisiensi produksi), menimbulkan
  - Stratifikasi & Struktur kelas

Cara produksi

- Tradisional
- kapitalisn
  - Terjadi adaptasi (menjadi instrumen percepatan evolusi), dan jika gagal beradaptasi dapat menimbulkan konflik.

Sistem bagi hasil merupakan bagian dari adaptasi

- Merupakan konsekuensi dari tingginya resiko usaha penangkapan ikan.
- Berbeda-beda tergantung karakteristik alat produksi dan karakteristik masyarakat
  - Antara juragan – pendiga
  - Antar pendiga

## ADAPTASI NELAYAN

- Asumsi dasar adaptasi berkembang dari pemahaman yang bersifat **evolusionari** yang senantiasa melihat manusia selalu berupaya untuk
  - **menyesuaikan diri dengan lingkungan alam sekitarnya**, baik secara biologis/genetik maupun secara budaya.
- Proses adaptasi dalam evolusi melibatkan **seleksi genetik dan varian budaya** yang dianggap **sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan**.
  - Adaptasi merupakan juga suatu proses yang dinamik karena baik organisme maupun lingkungan sendiri tidak ada yang bersifat konstan/tetap (Hardestry,45-46).

Roy Ellen membagi tahapan adaptasi dalam 4 tipe

1. Tahapan **phylogenetic** yang bekerja melalui **adaptasi genetik individu lewat seleksi alam**.
  - *Adaptasi phylogenetik*, dibatasi oleh tingkatan bagaimana populasi dapat **bereproduksi dan berkembang biak**.
2. **Modifikasi fisik dari phenotype/ciri-ciri fisik**,
  - Modifikasi fisik bekerja lebih cepat, akan tetapi tetap tergantung pada perubahan somatik (sel pembentuk tubuh) dan akomodasi yang dihubungkan dengan pertumbuhan fisik dan reorganisasi dari tubuh.
3. **Adaptasi kultural**
  - masing-masing komunitas mempunyai daya tahan yang berbeda **berdasarkan perasaan akan resiko, respon kesadaran, dan kesempatan**.
    - Sifat-sifat budaya mempunyai koefisiensi seleksi, variasi, perbedaan kematian-kelahiran, dan sifat budaya yang bekerja dalam sistem biologi.
    - proses bekerjanya dianggap lebih cepat

## 4. Modifikasi budaya >> pembentuk karakter spesifik yang dominan.

- a. **Manusia dilahirkan dengan kapasitas untuk belajar seperangkat nilai sosial dan kaidah-kaidah budaya yang tidak terbatas.**
- b. **Sehingga fokus perhatian adaptasi seharusnya dipusatkan pada proses belajar, dan modifikasi budayanya. (Rot Ellen)**

### Adaptasi Sebagai Strategi Bertahan Hidup Manusia

- Lingkungan memberikan ruang bagi individu dan populasi untuk bekerja secara aktif memodifikasi perilaku mereka dalam rangka **memelihara** kondisi tertentu, **menanggulangi resiko** tertentu pada suatu kondisi yang baru, atau **mengimprovisasi** kondisinya yang ada.
- Merupakan kesempatan, efek dari kehidupan sosial dan praktek kultural yang secara tidak sadar mempengaruhinya.
- Proses adaptif yang aktual merupakan kombinasi dari ke-3 mekanisme tersebut diatas (memelihara, menanggulangi, improvisasi).
- Oleh karena itu, variasi dalam praktek kultural mungkin meningkat karena kesempatan/tekanan pada sumber-sumber daya /group.
- Sehingga adaptasi bisa kita sebut sebagai sebuah strategi aktif manusia dalam menghadapi lingkungannya.
- Adaptasi dapat dilihat sebagai usaha untuk memelihara kondisi kehidupan dalam menghadapi perubahan.
  - Dengan demikian definisi adaptasi selalu berkaitan erat dengan pengukuran, dimana tingkat keberhasilan suatu organisme dapat bertahan hidup.
  - Sejauh mana, dapat dikenali bahwa adaptasi dapat dikatakan berhasil atau tidak.
- Adaptasi seharusnya dilihat sebagai respon kultural atau proses yang terbuka pada proses modifikasi terhadap bahaya/resiko (Hardestry, 243)

- Adaptasi populasi dengan habitatnya, di mana populasi membuat tempat hidupnya sesuai, atau dirinya sendiri lebih menyesuaikan diri untuk hidup dalam habitat (Cohen,3).

## Pendidikan dan mobilitas

- Tingkat pendidikan nelayan pada lapisan bawah tidak berpengaruh terhadap tingkat mobilitas nelayan.
- Tingkat pendidikan nelayan pada lapisan bawah dan menengah tidak berpengaruh terhadap tingkat mobilitas nelayan.

## Mobilitas antar generasi – vertikal

### A. Dilihat dari status orang tua

1. Pada periode I, mobilitas vertikal ke atas terjadi pada lapisan bawah-bawah dan bawah atas.
2. Pada periode II & III, mobilitas vertikal ke atas terjadi pada lapisan bawah-bawah ke lapisan atas-bawah dan atas-atas.

### B. Dilihat dari pengaruh orangtua terhadap status anak (Periode II)

1. Dari lapisan bawah-bawah, mobilitas vertikal ke atas pada umumnya bersifat jarak menengah, karena hanya sedikit yang mampu menembus ke lapisan atas (AB).
2. Dari lapisan menengah-atas mengalami mobilitas vertikal ke bawah (BB, BA, MB)

## Mobilitas antar generasi – vertikal (Periode III)

- Dari lapisan bawah-bawah yang mengalami mobilitas vertikal ke atas lebih besar (71,6%) daripada yang bertahan pada lapisan bawah-bawah (28,4%).
- Nelayan dari lapisan menengah-atas mengalami mobilitas vertikal ke bawah (71,4%); yang bertahan pada lapisan menengah-atas hanya 26,6%.

## KONFLIK NELAYAN

- Konflik adalah *ketegangan* dalam hubungan individu/kelompok karena dikuasi oleh *amarah* yang berlebihan
- Penyebab konflik secara umum:
  - Perbedaan individu
  - Perbedaan budaya
  - Perbedaan kepentingan
  - Perubahan sosial.
- Ditandai dengan tindakan menantang pihak lain yang diikuti dengan *ancaman* dan tindakan *kekerasan*.
- Penyebab konflik nelayan: Perebutan sumber daya perikanan yang jumlahnya terbatas di dalam wilayah perairan yang bersifat *open access*. (Satria, 2002)

Tipologi konflik nelayan (Satria, 2002)

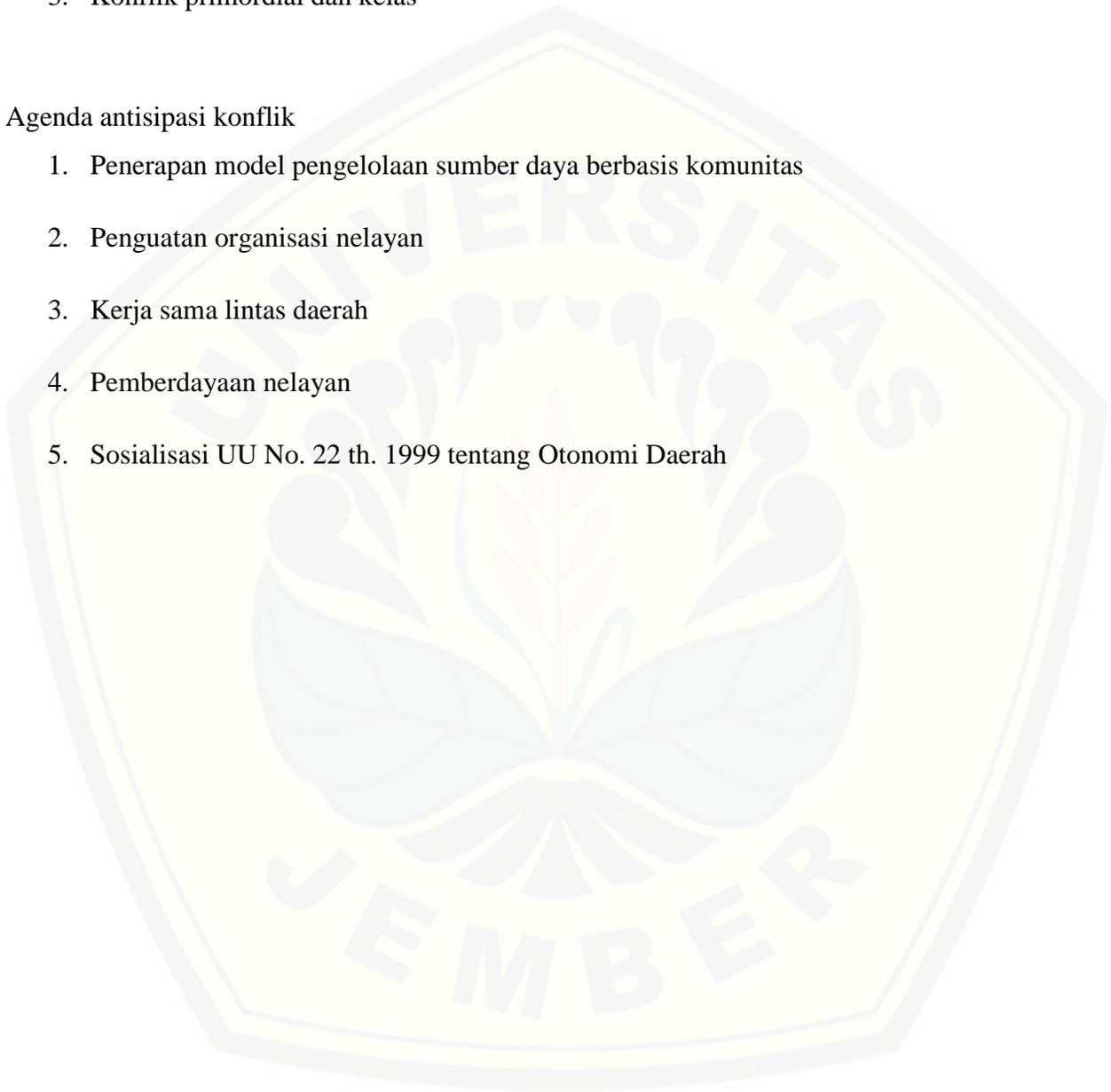
1. Konflik kelas; konflik antar kelas nelayan yang memperebutkan wilayah penangkapan ikan (*fishing ground*)
2. Konflik orientasi; karena perbedaan orientasi dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan
  - Orientasi jangka pendek >< jangka panjang (ramah lingkungan).
3. Konflik agraria; diakibatkan perebutan fishing ground antar kelas atau intern kelas dan dengan bukan nelayan
4. Konflik primordial; terjadi akibat perbedaan etnis, asal daerah, dll

## Pasca otonomi daerah

1. Fenomena pengkavlingan laut dan common fisheries
2. Kombinasi Konflik nelayan (kelas & lingkungan)
3. Konflik primordial dan kelas

## Agenda antisipasi konflik

1. Penerapan model pengelolaan sumber daya berbasis komunitas
2. Penguatan organisasi nelayan
3. Kerja sama lintas daerah
4. Pemberdayaan nelayan
5. Sosialisasi UU No. 22 th. 1999 tentang Otonomi Daerah



## KESETARAAN KUALITAS SDM BAHARI DENGAN BANGSA LAIN

*Konvensi Standars Of Training, Certification And Watchkeeping–For Fishing Vessel Personnel (STCW–F 1995)*

(Konvensi Standar Pelatihan, Sertifikasi Dan Pengawasan – Untuk Personil Kapal Penangkap Ikan (STCW–F 1995))

Naskah Penjelasan Pengesahan Konvensi STCW–F 1995

- Pekerjaan di atas kapal penangkap ikan memiliki karakteristik pekerjaan bersifat 3d yaitu”kotor (dirty)”, “membahayakan (dangereous)” dan “sulit (difficult)”.
- Diperlukan awak kapal yang memenuhi **kualifikasi** keahlian dalam keselamatan (safety), navigasi (navigation), pengoperasian kapal (ship operation) penangkapan ikan (fishing) guna memperkecil tingkat kecelakaan dan kesulitan dalam setiap kegiatan di atas kapal.

Kapal perikanan

- Kecelakaan umumnya dikarenakan kebakaran,
- kerusakan kapal karena kontrukksi kapal tidak tahan terhadap terjangan ombak besar,
- kandas, terbalik karena stabilitas kurang baik,
- penyebab lainnya adalah human error (dikarenakan kurang terlatihnya awak kapal perikanan).

Oleh karena itu

- a. Diperlukan Pendidikan dan pelatihan bersertifikat khusus kepelautan perikanan guna:
  - peningkatan berbagai kompetensi seperti keselamatan, navigasi, pengendalian dan pengoperasian kapal perikanan.
- b. Materi Pokok STCW-F 1995

- Awak kapal perikanan harus disertifikasi sesuai dengan ketentuan dalam lampiran Konvensi

## c. Sertifikasi

- Sertifikasi bagi nakhoda kapal perikanan dengan panjang 24 meter atau lebih yang beroperasi di perairan tak terbatas.
- Sertifikasi bagi perwira tugas jaga navigasi pada kapal perikanan dengan panjang 24 meter atau lebih yang beroperasi di perairan tak terbatas.
- Sertifikasi bagi nakhoda kapal perikanan dengan panjang 24 meter atau lebih yang beroperasi di perairan terbatas.
- Sertifikasi bagi perwira tugas jaga navigasi pada kapal perikanan dengan panjang 24 meter atau lebih yang beroperasi di perairan terbatas.
- Sertifikasi Kepala Kamar Mesin dan Masinis II pada kapal perikanan yang digerakkan oleh mesin penggerak utama dengan daya 750 KW atau lebih.
- Sertifikasi GMDSS bagi petugas radio di kapal perikanan.

## Prinsip Dasar STCW-F 1995

### A. Prinsip-Prinsip Dasar Umum

- Wajib dipenuhi oleh pemilik dan pengusaha penangkapan ikan, nakhoda kapal perikanan, dan petugas jaga adalah:
- Setiap saat mempertahankan keamanan dalam pelaksanaan tugas jaga, senantiasa menjaga keamanan dan keselamatan pelayaran, terutama dalam hal mencegah tubrukan kapal dan kapal kandas,
  - Kapal perikanan dengan ukuran panjang di bawah 24 meter yang beroperasi di perairan yang terbatas dapat dikecualikan dari prinsip-prinsip dasar ini.

### B. Prinsip-Prinsip Dasar Khusus

- Berlaku bagi pelayaran kapal perikanan dari dan ke daerah penangkapan meliputi:

1. Pengaturan tugas jaga navigasi yang meliputi komposisi petugas jaga dan faktor-faktor yang harus diperhatikan pada saat pelaksanaan tugas jaga.
2. Kebugaran awak kapal perikanan dalam melaksanakan tugas jaga.
3. Pengaturan pelayaran yang meliputi antara lain rencana pelayaran, posisi, kecepatan dan arah kapal, alat bantu navigasi, dan larangan untuk alih tugas jaga.
4. Ketentuan tentang peralatan navigasi dan tata cara penggunaannya.
5. Pengaturan tugas-tugas navigasi dan tanggung jawab petugas jaga.
6. Pengamatan keliling kapal perikanan.
7. Perlindungan lingkungan laut.
8. Kondisi cuaca.

Hal lain yang harus diperhatikan menurut konvensi ini adalah:

1. Nakhoda dan perwira jaga tetap bertanggung jawab atas navigasi dengan pandu di atas kapal.
2. Nakhoda dan perwira jaga pada saat menangkap ikan dan pada saat mencari gerombolan ikan wajib memperhatikan situasi dan kondisi internal dan lingkungan di sekitar kapal perikanan.
3. Tugas jaga radio harus dilakukan selama pelayaran sesuai peraturan radio.
4. Tugas jaga wajib dilakukan pada saat kapal penangkap ikan tambat labuh.

Manfaat pengesahan konvensi STCW-F 1995 untuk Indonesia antara lain adalah :

1. Kepastian hukum bagi awak kapal perikanan dalam melaksanakan tugas, untuk meningkatkan produktivitas kerja, yang akan meningkatkan penghasilan mereka. Secara tidak langsung adanya perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif terhadap awak kapal perikanan Indonesia.
2. Dengan meningkatnya standar kualitas awak kapal perikanan Indonesia, dunia internasional akan memosisikan awak kapal perikanan Indonesia sejajar dengan awak kapal perikanan negara lain yang lebih maju.
3. Pengakuan pihak asing tentang mutu produk perikanan yang higienis dan aman.
4. Meningkatkan penyerapan dan daya saing awak kapal perikanan asal Indonesia di pasar kerja global.

5. Meningkatkan devisa negara dari pemasaran produk perikanan dan penempatan tenaga kerja di luar negeri.
6. Meningkatkan keselamatan navigasi dan penangkapan ikan.
7. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab.
8. Meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia sebagai negara maritim di dunia internasional.
9. Membatasi awak kapal perikanan asing yang tidak memiliki kompetensi yang akan bekerja di kapal perikanan Indonesia.
10. Meningkatkan kerja sama internasional khususnya di bidang kelautan dan perikanan.
11. Meningkatkan investasi usaha di bidang kelautan dan perikanan di dalam negeri.
12. Meningkatkan kemampuan awak kapal perikanan dalam memanfaatkan teknologi maju.
13. Memacu nelayan kecil untuk meningkatkan kompetensi kepelautan dan perikanan.

## **Kewajiban Pemerintah RI**

- 1) Memberlakukan dan mensosialisasikan ketentuan-ketentuan Konvensi STCW-F1995 dan seluruh lampirannya.
- 2) Pengelolaan pendidikan dan pelatihan harus sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Konvensi STCW-F 1995 yaitu memenuhi standar kurikulum, tenaga pengajar, sarana dan prasarana serta ujian dan sertifikasi.
- 3) Memenuhi standar tugas jaga pada kapal perikanan untuk menjamin keselamatan pelayaran dan penangkapan ikan sesuai dengan yang dipersyaratkan Konvensi STCWF1995.
- 4) Melaporkan kebijakan yang telah diambil dalam memberlakukan sepenuhnya ketentuan-ketentuan Konvensi STCW-F1995, termasuk contoh sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah RI sesuai dengan Konvensi STCW-F1995 kepada Sekjen IMO.
- 5) Menetapkan proses dan prosedur penyelidikan terhadap hal-hal yang dapat mengakibatkan ancaman keselamatan jiwa, harta benda di laut, atau lingkungan laut yang dilakukan oleh para pemegang sertifikat yang diterbitkan Pemerintah RI.
- 6) Meninjau kembali kesepakatan, perjanjian, dan konvensi untuk menjamin bahwa tidak ada pertentangan dengan Konvensi STCW-F 1995.
- 7) Semua hal-hal yang tidak dengan tegas diatur dalam Konvensi STCW-F1995 tetap harus tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

- 8) Menentukan denda atau sanksi terhadap kasus-kasus pelanggaran peraturan perundangan nasional yang menunjang pemberlakuan Konvensi STCW-F 1995.
- 9) Melakukan kerjasama dengan negara lain yang telah mengesahkan Konvensi STCW-F 1995.
- 10) Memeriksa sertifikat awak kapal penangkap ikan milik negara lain yang telah mengesahkan Konvensi STCW-F 1995 pada saat berada di pelabuhan-pelabuhan Indonesia.
- 11) Menilai tingkat kesalahan kapal yang membahayakan awak kapal penangkap ikan, harta benda, dan lingkungan laut dan mengambil tindakan guna menjamin bahwa kapal tersebut tidak akan berlayar sampai persyaratan dipenuhi. Fakta tersebut harus dilaporkan kepada IMO.
- 12) Melakukan konsultasi dengan IMO untuk dapat bekerja sama antar negara-negara yang telah mengesahkan STCW-F 1995 secara sub regional, regional dan kerjasama dengan Organisasi Buruh Sedunia (ILO) dan Organisasi Pangan dan Pertanian Sedunia (FAO).

## **Konsekuensi Pengesahan STCW-F 1995**

### **1. Konsekuensi Hukum**

Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur pendidikan dan pelatihan awak kapal perikanan, sertifikasi kepelautan, pengawakan kapal perikanan, ketenagakerjaan yang berkaitan dengan kapal perikanan, keselamatan pelayaran kapal perikanan, keselamatan dalam penangkapan ikan pada kapal perikanan, daerah pelayaran kapal perikanan, perlu diharmonisasikan dengan Konvensi STCW-F 1995.

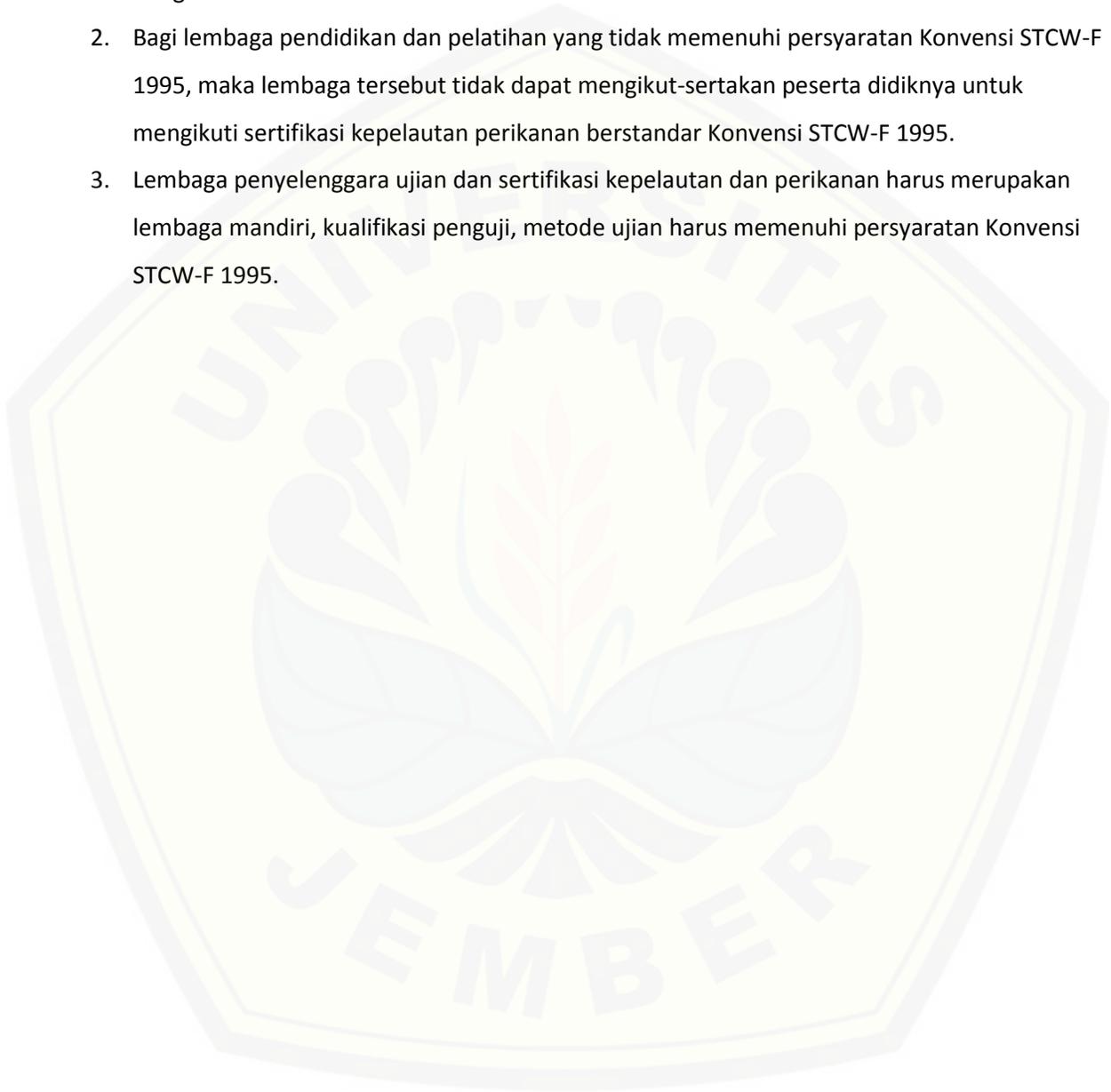
### **2. Konsekuensi Kelembagaan**

Indonesia harus menetapkan lembaga pemerintah yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Konvensi STCW-F 1995.

1. Tugas pokok Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dibidang kelautan dan perikanan.
2. Penyelenggaraannya sudah berlangsung selama ini, hanya saja belum sepenuhnya mengikuti standar yang ada dalam Konvensi STCW-F 1995.
3. Kelembagaan harus ini diinformasikan kepada IMO dan menjadi anggota kelembagaan yang berada di bawah IMO.

### 3. Konsekuensi Pendidikan dan Pelatihan, Ujian dan Sertifikasi Kepelautan Perikanan

1. Indonesia harus memenuhi standar kurikulum, tenaga pengajar, sarana dan prasarana, ujian dan sertifikasi, dan pengelolaan pendidikan dan pelatihan kepelautan perikanan sesuai dengan Konvensi STCW-F 1995.
2. Bagi lembaga pendidikan dan pelatihan yang tidak memenuhi persyaratan Konvensi STCW-F 1995, maka lembaga tersebut tidak dapat mengikutsertakan peserta didiknya untuk mengikuti sertifikasi kepelautan perikanan berstandar Konvensi STCW-F 1995.
3. Lembaga penyelenggara ujian dan sertifikasi kepelautan dan perikanan harus merupakan lembaga mandiri, kualifikasi penguji, metode ujian harus memenuhi persyaratan Konvensi STCW-F 1995.





## **PERIKANAN INDONESIA-AUSTRALIA (KASUS PENCURIAN IKAN)**

- Tahun 2004 Australian Maritime Identification Zone:
  - Pemeriksaan Kapal dalam radius 1.000 mil dengan alasan menjamin keamanan Australia.
  - Radius 1.000 mil (AMIZ) menimbulkan masalah baru perbatasan wilayah ZEE Ind-NZ-Australia.
- UNCLOS 1982 Ps 51 Hak penangkapan ikan nelayan tradisional.
- MoU Box 1974 Indonesia-Australia: Ijin penangkapan moluska di wilayah perairan Australia (jarak terdekat dengan NTT 120 km), yakni di:
  - Pulau Ashmore
  - Pulau Cartier
  - Pulau Scott
  - Pulau Seringapatam
  - Pulau Browse
- Individual Transferable Catch Quota (ITCQ):
  - Batas minimum kuota penangkapan ikan 5 ton/tahun.
- Fisheries Management Act 1991:
  - Foreign fishing boats licenses (tidak mengatur traditional fishing right).
- Fisheries Management Act 1994:
  - (tidak mengatur traditional fishing right - Aborigin).

## **Pencurian Ikan**

- 70% dari 700 Surat Ijin Penangkapan Ikan (SPI) dipergunakan kapal asing (Thailand, Taiwan, RRC, Filipina, Jepang, Korea Selatan) berbendera Indonesia

### Penyebab pencurian

- a. Penyalah-gunaan perizinan & pengawasan lemah (menurut TNI AL).
- b. Kolaborasi TNI AL dengan kapal asing.
- c. Lemahnya penegakan hukum oleh aparat (Satria, 2009).

### Kapal Asing

- Kepmen KP No. 60/2001: Skema Ijin kapal asing:
  - Usaha patungane (joint venture)
  - Beli angsur (puschase on installment)
  - Lisensi (licencing).
- Ijin Kapal Asing 2005: Kapal asing harus bekerja sama mengembangkan industri pengolahan ikan dan merekrut awal kapal dari warga negara Indonesia.

## **Pengembangan Kebijakan**

1. Desentralisasi ijin kapal < 100 GT ke Pemprop.
2. Co-management pengawasan (polairut, bea cukai, kehakiman, Kejaksaan, masyarakat nelayan).
  1. Bakorkamla
  2. Siswasmas
3. Pengadilan ad-hoc perikanan 30 hari.
4. Pengembangan armada nasional untuk ZEE.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzi, Akhmad. 2005. *Kebijakan Perikanan dan Kelautan*. Jakarta: Gramedia.
- Kusnadi. 2000. *Nelayan: Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Pangamba' Kaum Perempuan Fenomenal: Pelopor dan Penggerak Perekomian Masyarakat Nelayan*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan*. Yogyakarta: LKiS.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Akar Kemiskinan Nelayan*. Yogyakarta: LKiS.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. Jember: Pusat Penelitian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Lembaga Penelitian, UNEJ.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Jaminan Sosial Nelayan: Ketimpangan Relasi Negara dan Masyarakat*. Yogyakarta: LKiS.
- Rokhmin Dahuri (dkk.). 2001. *Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Satria, Arief (dkk.). 2002. *Menuju Desentralisasi Kelautan*. Jakarta: Cidesindo.
- Satria, Arief (dkk.). 2002. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Jakarta: Cidesindo.